



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TOTOK HENDRATMOKO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDARIAS DANIEL KAMBU

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Sorong, 07 Januari 2025

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya,

ANDARIAS DANIEL KAMBU



Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya,

TOTOK HENDRATMOKO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90%
3	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	3 Kegiatan
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
6	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi	5 Kegiatan
7	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder	Persentase penyampaian Informasi dan Publikasi yang ditampilkan pada media publikasi	100%
8	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
9	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian	100%
10	Terlaksananya layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase ASN yang terseleksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.	100%
11	Meningkatnya Kompetensi SDM KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
12	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan	100%
13	Terlaksananya fasilitasi untuk Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu	Persentase Peserta Pemilu dan Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
14	Tersedianya dokumen hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota	100%
15	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Provinsi	100%
16	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase jumlah laporan SPIP yang tepat waktu	12 Laporan
17	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%
18	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Provinsi	100%
19	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	100%
20	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan inventarisir sisa logistik pemilu/pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	100%
21	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola arsip inaktif sesuai peraturan kearsipan	85%
22	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi	90%
23	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	6 Laporan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	0
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 12.344.777.000

Kota Sorong, 07 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya,



TOTOK HENDRATMOKO